

**PELAKSANAAN PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PRAJABATAN
OLEH BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA (BPSDM)
PROVINSI RIAU DI KABUPATEN KUANTAN SINGINGI TAHUN 2018**

Oleh : Asmar Dika

Email : adkajasri@gmail.com

Dosen Pembimbing : Drs. M.Y. Tiyas Tinov, M.Si.

Jurusan Ilmu Pemerintahan

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Riau

Kampus Bina Widya, Jl. H.R. Soebrantas Km 12,5 Simp. Baru, Pekanbaru 28293

Telp/Fax. 0761-63277

Abstract

The Implementation of the Pre-service education and training program by Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) of Riau Province in Kuantan Singingi Regency in 2018 is still not effective. This is indicated by the large number of government employees who have not optimally carried out their duties and roles as community servants. This study aims to find out: (1) material on national insights, the role and function of the State Civil Apparatus (ASN) and the position, obligations and rights of civil servants, and the mindset of ASN as a community service provided by BPSDM Riau Province; (2) the ability of participants in education and pre-service training in Kuantan Singingi Regency related to national insight, the role and function of the State Civil Apparatus (ASN) and the position, obligations and rights of civil servants, and the mindset of ASN as a community service; and (3) effectiveness of the implementation of pre-service education and training programs by BPSDM Riau Province in Kuantan Singingi Regency. This research uses a qualitative method with a descriptive approach. Data collection techniques used were interview and documentation techniques. The results of the study can be concluded that: (1) material national insight provided by the political concept of the Indonesian nation which views Indonesia as an inseparable region (land-sea-air), which unites the nation and state as a whole in all areas of life including: politics, economic, socio-cultural and defense and security. Material on the role and function of the State Civil Apparatus (ASN) and the position, obligations and rights of civil servants is contained in Law Number 5 of 2014 concerning State Civil Apparatus. While the ASN mindset material as a community service is in the form of an ASN or PNS self concept; (2) the ability of the participants in the education and training of Kuantan Singingi pre-service is in accordance with the material provided by BPSDM, but only a small portion of the material; and (3) the implementation of pre-service education and training programs by BPSDM Riau Province in Kuantan Singingi Regency is considered to be effective. Because the aspects given are considered appropriate for the needs of newly appointed civil servants.

Keywords: Implementation, Pre-service Education and Training Program, BPSDM

Pendahuluan

Pendidikan dan Pelatihan adalah diklat prajabatan (golongan II dan III) yang merupakan syarat pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) untuk menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) sesuai golongan tersebut di atas. Diklat prajabatan adalah salah satu syarat bagi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) sebelum diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS).

Tujuan diklat prajabatan terdapat pada pasal 7 Peraturan Pemerintah No. 101 Tahun 2000, yaitu untuk memberikan pengetahuan dalam rangka pembentukan wawasan kebangsaan, kepribadian dan etika PNS, disamping pengetahuan dasar tentang sistem penyelenggaraan pemerintahan negara, bidang tugas, dan budaya organisasinya agar mampu melaksanakan tugas dan perannya sebagai pelayan masyarakat.¹

Diklat prajabatan dilaksanakan oleh masing-masing institusi pemerintahan daerah, yaitu Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM). Dalam hal ini adalah BPSDM Provinsi Riau. Dasarnya adalah Peraturan Pemerintah

Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, berdasarkan peraturan tersebut terbentuklah Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, dimana salah satu Badan Daerah Provinsi adalah Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM).

BPSDM Provinsi Riau merupakan perangkat daerah yang melaksanakan fungsi penunjang penyelenggaraan urusan pemerintah Bidang Kepegawaian dan Bidang Pendidikan dan Pelatihan yang menjadi kewenangan provinsi.² Salah satu program BPSDM Provinsi Riau adalah melaksanakan diklat prajabatan bagi CPNS. Diklat prajabatan dilaksanakan BPSDM Provinsi Riau untuk menjadikan CPNS mampu memahami wawasan kebangsaan, memahami sikap untuk tidak korupsi, memahami ketentuan kepegawaian Aparatur Sipil Negara (ASN), dan memahami pola pikir ASN. CPNS yang mengikuti diklat adalah golongan II dan golongan III tahun 2018 dengan data sebagai berikut.

¹ Peraturan Pemerintah No. 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil Pasal 7

² Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah

Tabel 1.1
Peserta Diklat Prajabatan Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2018³

No.	Instansi	Jumlah CPNS		Total
		Golongan II	Golongan III	
1	UPTD Kesehatan:			
	1) UPTD Kesehatan Pengan	15	-	15
	2) UPTD Kesehatan Lubuk Ambacang	9	-	9
	3) UPTD Kesehatan Sukajara	6	2	8
	4) UPTD Kesehatan Koto Rajo	10	-	10
	5) UPTD Kesehatan Sentajo	5	-	5
	6) UPTD Kesehatan Pangkalan	8	-	8
	7) UPTD Kesehatan Kari	6	-	6
	8) UPTD Kesehatan Lubuk Jambi	10	-	10
	9) UPTD Kesehatan Cerenti	8	-	8
	10) UPTD Kesehatan Teluk Kuantan	8	-	8
	11) UPTD Kesehatan Benai	9	-	9
	12) UPTD Kesehatan Sungai Keranji	4	-	4
	13) UPTD Kesehatan Sungai Buluh	4	1	5
	14) UPTD Kesehatan Inuman	10	-	10
	15) UPTD Kesehatan Kopah	3	-	3
	16) UPTD Kesehatan Gunung Toar	10	-	10
	17) UPTD Kesehatan Baserah	14	-	14
	18) UPTD Kesehatan Koto Baru	6	-	6
	19) UPTD Kesehatan Perhentian Luas	7	-	7
	20) UPTD Kesehatan Muara Lembu	5	-	5
21) UPTD Kesehatan Sungai Sirih	3	1	4	

³ Lampiran Data Peserta Diklat Prajabatan Golongan II dan III Kabupaten Kuantan Singingi

No.	Instansi	Jumlah CPNS		Total
		Golongan II	Golongan III	
	22) UPTD Kesehatan Sentajo Raya	7	-	7
	23) UPTD Kesehatan Lubuk Ramo	2	-	2
	24) UPTD Kesehatan Beringin Jaya	4	1	5
2	Dinas Pertanian	12	10	22
	Jumlah	185	15	200

Berdasarkan tabel tersebut, diklat prajabatan untuk tahun 2018 hanya berasal dari dua instansi pemerintah daerah, yaitu UPTD Kesehatan dan Dinas Pertanian peserta terbanyak adalah CPNS golongan II atau mencapai 185 orang, sedangkan golongan III hanya 15 orang. Total seluruh peserta diklat prajabatan tahun 2018 adalah 200 orang, dimana diklat prajabatan ini hanya dikhususkan bagi CPNS golongan II dan III.

Sebagaimana tercantum dalam Keputusan Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Riau tentang tata tertib pendidikan dan pelatihan prajabatan CPNS Golongan II dan III angkatan II formasi honorer kategori 2 Provinsi Riau di Lingkungan Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi Tahun Ajaran 2018, bahwa kompetensi yang dibangun dalam diklat prajabatan CPNS Golongan II dan III formasi honorer kategori 2 adalah kompetensi sebagai pelayanan masyarakat yang baik, yang diindikasikan dengan kemampuan:

- 1) Memahami wawasan kebangsaan sebagai dasar mengutamakan kepentingan nasional dalam pelaksanaan tugas jabatannya
- 2) Memahami sikap untuk tidak korupsi dan mendorong percepatan pemberantasan korupsi di lingkungan instansinya
- 3) Memahami ketentuan kepegawaian berkaitan dengan peran dan fungsi Aparatur Sipil Negara (ASN) dan

tidak memahami tugas dan pokok fungsi, dan masih adanya pejabat yang tidak bisa membagikan tugas-tugas kepada bawahan secara baik.⁴

- 4) Pernyataan tersebut di atas mengindikasikan atau dapat dikatakan bahwa pelaksanaan program diklat oleh BPSDM Provinsi Riau selama ini adalah belum efektif. Karena PNS tidak mengutamakan kepentingan nasional dalam pelaksanaan tugas jabatannya.

Memahami pola pikit Permasalahan yang terjadi, masih banyaknya Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang belum optimal melaksanakan tugas dan perannya sebagai pelayan masyarakat. Hal tersebut diketahui dari pernyataan Bupati Kabupaten Kuantan Singingi, yaitu: Saat ini birokrasi dan pelayanan publik di Kabupaten Kuantan Singingi masih banyak mengalami masalah. Demikian pula para bawahannya, banyak yang tak paham tupoksinya. Dapat terlihat dari kurangnya disiplin pegawai di

⁴ detakriau.com. 2018. Bupati Kuansing Harapkan Birokrasi dan Pelayanan Publik Meningkat. Diakses Tanggal 23 September 2018.

lingkungan Pemkab. Kemudian menunda-nunda tugas kedinasan.⁵

Sumber lain menyebutkan bahwa:

Bupati Kuansing saat memberikan arahan pada pembukaan rapat koordinasi (rakor) ini menyampaikan bahwa birokrasi dan pelayanan publik di Kabupaten Kuansing saat ini masih mengalami berbagai masalah. Hal ini bisa terlihat dari masih kurangnya disiplin ASN, ASN selalu menunda-nunda tugas-tugas kedinasan, masih banyaknya pejabat yang tidak memahami tugas dan pokok fungsi, dan masih adanya pejabat yang tidak bisa membagikan tugas-tugas kepada bawahan secara baik.⁶

Pernyataan tersebut di atas mengindikasikan atau dapat dikatakan bahwa pelaksanaan program diklat oleh BPSDM Provinsi Riau selama ini adalah belum efektif. Karena PNS tidak mengutamakan kepentingan nasional dalam pelaksanaan tugas jabatannya.

Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang masalah di atas, maka permasalahan yang di rumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah materi wawasan kebangsaan, peran dan fungsi Aparatur Sipil Negara (ASN) dan kedudukan, kewajiban dan hak PNS, serta pola pikir ASN sebagai pelayanan masyarakat yang diberikan oleh BPSDM Provinsi Riau?

⁵ ranahriau.com. 2018. Pelayanan Publik Mengalami Berbagai Masalah di Kuansing. Diakses Tanggal 22 September 2018

⁶ detakriau.com. 2018. Bupati Kuansing Harapkan Birokrasi dan Pelayanan Publik Meningkat. Diakses Tanggal 23 September 2018.

2. Bagaimanakah kemampuan para peserta pendidikan dan pelatihan prajabatan Kabupaten Kuantan Singing terkait wawasan kebangsaan, peran dan fungsi Aparatur Sipil Negara (ASN) dan kedudukan, kewajiban dan hak PNS, serta pola pikir ASN sebagai pelayanan masyarakat?
3. Bagaimanakah efektivitas pelaksanaan program pendidikan dan pelatihan prajabatan oleh BPSDM Provinsi Riau di Kabupaten Kuantan Singing?

Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk:

1. Mengetahui materi wawasan kebangsaan, peran dan fungsi Aparatur Sipil Negara (ASN) dan kedudukan, kewajiban dan hak PNS, serta pola pikir ASN sebagai pelayanan masyarakat yang diberikan oleh BPSDM Provinsi Riau
2. Mengetahui kemampuan para peserta pendidikan dan pelatihan prajabatan Kabupaten Kuantan Singing terkait wawasan kebangsaan, peran dan fungsi Aparatur Sipil Negara (ASN) dan kedudukan, kewajiban dan hak PNS, serta pola pikir ASN sebagai pelayanan masyarakat
3. Mengetahui efektivitas pelaksanaan program pendidikan dan pelatihan prajabatan oleh BPSDM Provinsi Riau di Kabupaten Kuantan Singing.

Sedangkan kegunaan penelitian ini adalah:

1. Secara teoritis penulisan ini diharapkan mampu meningkatkan kemampuan berfikir dan penerapan teori-teori yang relevan melalui penelitian karya ilmiah.
2. Secara praktis penulisan ini diharapkan dapat bermanfaat

sebagai bahan acuan atau masukan bagi pemerintah khususnya Kantor BPSDM Provinsi Riau.

Kerangka Teori

Teori Konsep Tata Kelola Pemerintahan

Pemerintah dalam paradigma lama memiliki objek material negara sehingga pemerintah berorientasi pada kekuasaan, namun dalam paradigma baru pemerintah dipandang memiliki objek materialnya masyarakat, sehingga pemerintahan dimaknai sebagai suatu proses menata kelola kehidupan masyarakat dalam suatu pemerintahan/negara.

Tujuan utama penyelenggaraan otonomi daerah menurut Mardiasmo adalah untuk meningkatkan pelayanan publik dan memajukan perekonomian daerah. Pada dasarnya terkandung tiga misi utama pelaksanaan otonomi daerah yaitu: (1) meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat; (2) menciptakan efisiensi dan efektivitas pengelolaan sumber daya daerah, dan; (3) memberdayakan dan menciptakan ruang bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam proses pembangunan.⁷

Penerapan tata pemerintahan yang baik di lingkungan pemerintahan tidak terlepas dari penerapan sistem manajemen pemerintahan yang merupakan rangkaian hasil dari pelaksanaan fungsi-fungsi manajemen (*planning, implementing, controlling, and evaluating*) yang dilaksanakan secara profesional dan konsisten. Penerapan sistem manajemen tersebut mampu menghasilkan kemitraan positif antara pemerintah, dunia usaha swasta, dan masyarakat. Melalui hal tersebut, lingkungan instansi pemerintah

diharapkan dapat memberikan pelayanan prima kepada masyarakat.

Metode Penelitian

Jenis dan Pendekatan Penelitian

Metode penelitian merupakan suatu cara atau jalan untuk memperoleh kembali pemecahan terhadap segala permasalahan. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif. Menurut Sugiyono metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi.⁸

Penulis menguraikan tulisan ini menggunakan pendekatan deskriptif analitis yaitu usaha mengumpulkan, menyusun dan menginterpretasikan data yang ada kemudian menganalisa data tersebut, menelitinya, menggambarkan dan menelaah secara lebih jelas dari berbagai faktor yang berkaitan dengan kondisi, situasi dan fenomena yang diselidiki.⁹

Pembahasan

BPSDM Provinsi Riau telah memberikan program pendidikan dan pelatihan (diklat) prajabatan kepada CPNS Kabupaten Kuantan Singingi pada Tahun 2018. Materi-materi yang diberikan pada program diklat tersebut adalah terkait wawasan kebangsaan, materi terkait ASN (peran, fungsi, kedudukan, kewajiban, dan hak), serta materi tentang pola pikir ASN sebagai pelayan publik.

Kemampuan para peserta diklat (CPNS) Kabupaten Kuantan Singingi pada tahun 2018 sebenarnya sudah diketahui dari nilai yang diperolehnya (kognitif).

⁷ Mardiasmo, 2005, Manajemen Kinerja Sektor Publik, UPPAMP YKPN, Yogyakarta. Hal. 46

⁸ Sugiyono, 2018, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D, Alfabeta, Bandung. Hal. 9

⁹ Moleong, Lexy, 2016, Metodologi Penelitian Kualitatif, Rosdakarya, Bandung. Hal 15

Hanya saja, diperlukan suatu wawancara untuk memastikan penguasaan para peserta mengenai wawasan kebangsaan, ASN, dan tentang pola pikir ASN sebagai pelayan masyarakat. Sehingga nilai kognitif yang sudah ada dapat dipertanggung jawabkan.

Melalui hasil wawancara, diketahui bahwa kemampuan para peserta diklat (CPNS) Kabupaten Kuantan Singingi pada tahun 2018 juga sesuai dengan materi yang diberikan oleh pihak BPSDM Provinsi Riau. Walaupun tidak disebutkan secara rinci sesuai materi wawasan kebangsaan, materi terkait ASN (peran, fungsi, kedudukan, kewajiban, dan hak), serta materi tentang pola pikir ASN sebagai pelayan publik. Namun, jawaban yang diberikan terkait dengan aspek-aspek tersebut.

Pemberian program diklat prajabatan oleh BPSDM Provinsi Riau kepada CPNS Kabupaten Kuantan Singingi dinilai efektif jika ditinjau dari permasalahan yang sering dihadapi oleh bangsa ini terkait ASN. Dimana masalah yang sering terjadi adalah masih kurangnya kecintaan ASN terhadap bangsanya, sehingga tidak bekerja dengan motivasi tinggi. Melalui wawasan kebangsaan diharapkan ASN menjadi sosok yang cinta tanah air, memiliki loyalitas bagi bangsanya, dan tentunya bekerja dengan motivasi baik.

Dalam Peraturan Pemerintah No. 101 Tahun 2000 tentang pendidikan dan pelatihan jabatan Pegawai Negeri Sipil

Diklat prajabatan adalah salah satu syarat bagi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) sebelum diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS).

Tujuan diklat prajabatan terdapat pada pasal 7 Peraturan Pemerintah No. 101 Tahun 2000, yaitu untuk memberikan pengetahuan dalam rangka pembentukan wawasan kebangsaan, kepribadian dan etika PNS, disamping pengetahuan dasar tentang sistem penyelenggaraan pemerintahan negara, bidang tugas, dan budaya organisasinya agar mampu

melaksanakan tugas dan perannya sebagai pelayan masyarakat.¹⁰

Diklat prajabatan dilaksanakan oleh masing-masing institusi pemerintahan daerah, yaitu Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM). Dalam hal ini adalah BPSDM Provinsi Riau. Dasarnya adalah Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, berdasarkan peraturan tersebut terbentuklah Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, dimana salah satu Badan Daerah Provinsi adalah Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM).

BPSDM Provinsi Riau merupakan perangkat daerah yang melaksanakan fungsi penunjang penyelenggaraan urusan pemerintah Bidang Kepegawaian dan Bidang Pendidikan dan Pelatihan yang menjadi kewenangan provinsi.¹¹ Salah satu program BPSDM Provinsi Riau adalah melaksanakan diklat prajabatan bagi CPNS. Diklat prajabatan dilaksanakan BPSDM Provinsi Riau untuk menjadikan CPNS mampu memahami wawasan kebangsaan, memahami sikap untuk tidak korupsi, memahami ketentuan kepegawaian Aparatur Sipil Negara (ASN), dan memahami pola pikir ASN.

¹⁰ Peraturan Pemerintah No. 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil Pasal 7

¹¹ Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah

Melalui analisis data hasil penelitian tersebut di atas, bahwa BPSDM Provinsi Riau telah memberikan program pendidikan dan pelatihan (diklat) prajabatan kepada CPNS Kabupaten Kuantan Singingi pada Tahun 2018. Materi-materi yang diberikan pada program diklat tersebut adalah terkait wawasan kebangsaan, materi terkait ASN (peran, fungsi, kedudukan, kewajiban, dan hak), serta materi tentang pola pikir ASN sebagai pelayan publik.

Pemberian materi terkait wawasan kebangsaan, ASN, tindakan tidak korupsi, dan tentang pola pikir ASN, diberikan oleh widyaiswara BPSDM Provinsi Riau. Setiap kompetensi atau materi diberikan oleh widyaiswara yang berbeda-beda, sesuai kompetensinya masing-masing. Banyaknya materi yang diberikan berbeda-beda, sehingga waktu yang dibutuhkan untuk menyampaikan seluruh materi juga berbeda-beda.

Materi wawasan kebangsaan diberikan sebanyak 6 jam pelajaran, memahami sikap untuk tidak korupsi itu 12 jam pelajaran, terkait ASN adalah 15 jam pelajaran, dan pola pikir ASN sebagai pelayan masyarakat adalah 24 jam pelajaran. Setelah seluruh peserta diklat (CPNS) mengikuti jam pelajaran yang telah ditetapkan, maka setiap peserta diberikan tes terkait materi yang telah diikuti.

Tes yang diberikan adalah tes tertulis berupa pilihan ganda terkait wawasan kebangsaan, mengenai ASN, tindakan tidak korupsi, dan tentang pola pikir ASN sebagai pelayan masyarakat. Hanya saja, tes yang diberikan adalah terkait materi atau pengetahuan saja (kognitif), tidak ada penilaian sikap atau psikomotor terkait materi yang telah diberikan. Sehingga data penelitian ini hanya berupa data nilai dari hasil tes kognitif saja, karena hanya data tersebut yang tersedia.

Penelitian ini juga hanya meneliti empat kemampuan saja, atau tidak menyertakan kemampuan untuk tidak korupsi, karena sulitnya memberikan pertanyaan terkait materi tersebut, selain itu tindakan korupsi lebih efektif dinilai berdasarkan observasi dibandingkan wawancara. Oleh sebab itu, untuk kemampuan tidak korupsi tidak dimasukkan dalam penelitian ini, sehingga kemampuan dibatasi pada wawasan kebangsaan, ASN, dan tentang pola pikir ASN sebagai pelayan masyarakat.

Kemampuan para peserta diklat (CPNS) Kabupaten Kuantan Singingi pada tahun 2018 sebenarnya sudah diketahui dari nilai yang diperolehnya (kognitif). Hanya saja, diperlukan suatu wawancara untuk memastikan penguasaan para peserta mengenai wawasan kebangsaan, ASN, dan tentang pola pikir ASN sebagai pelayan masyarakat. Sehingga nilai kognitif yang sudah ada dapat dipertanggung jawabkan.

Melalui hasil wawancara, diketahui bahwa kemampuan para peserta diklat (CPNS) Kabupaten Kuantan Singingi pada tahun 2018 juga sesuai dengan materi yang diberikan oleh pihak BPSDM Provinsi Riau. Walaupun tidak disebutkan secara rinci sesuai materi wawasan kebangsaan, materi terkait ASN (peran, fungsi, kedudukan, kewajiban, dan hak), serta materi tentang pola pikir ASN sebagai pelayan publik. Namun, jawaban yang diberikan terkait dengan aspek-aspek tersebut.

Pemberian program diklat prajabatan oleh BPSDM Provinsi Riau kepada CPNS Kabupaten Kuantan Singingi dinilai efektif jika ditinjau dari permasalahan yang sering dihadapi oleh bangsa ini terkait ASN. Dimana masalah yang sering terjadi adalah masih kurangnya kecintaan ASN terhadap bangsanya, sehingga tidak bekerja dengan motivasi tinggi. Melalui wawasan kebangsaan diharapkan ASN menjadi

sosok yang cinta tanah air, memiliki loyalitas bagi bangsanya, dan tentunya bekerja dengan motivasi baik.

Kemudian ASN juga harus memahami peran, fungsi, kedudukan, kewajiban, dan haknya sebagai PNS. Jadi yang menjadi haknya.

Terkhir, pola pikir ASN sebagai pelayan masyarakat harus ditanamkan pada pikiran dan diri masing-masing ASN agar PNS selalu memberikan pelayanan yang prima bagi masyarakat. Pelayanan permasalahan-permasalahan masih kurang baiknya pelayanan yang diberikan oleh ASN.

PNS akan bekerja dengan benar sesuai aturan. PNS akan menjadi abdi negara yang taat aturan dan menjalankan kewajibannya sebagaimana mestinya. Disamping itu, PNS mengetahui hal-hal

prima tentunya tidak membeda-bedakan antara satu orang dengan orang lainnya, baik itu kualitas dan kuantitasnya, bahkan waktunya. Oleh sebab itu, ASN yang memahami pola pikir yang benar. .

Tabel 1.3
Informan Penelitian¹²

No	Jabatan	Nama
1	Kepala BPSDM Provinsi Riau	H. Kasiaruddin
2	Kabid Pengembangan Kompetensi Manajerial BPSDM Provinsi Riau	Tengku Fazly Redwan, S.Sos., M.Si.
3	Widyaiswara BPSDM Provinsi Riau	Hj. Yuniarti, SE., M.Si.
4	Peserta Diklat Kelas A	1) Teti Anatri Oriza, A.Md.Keb 2) Marsis Mayanti, A.Md.Keb
5	Peserta Diklat Kelas B	1) Husni Thamrin 2) Nuning Sevilda, A.Md.Keb
6	Peserta Diklat Kelas C	1) Wistri Putri Hasraya A.Md.Keb 2) Roslaini, A.Md.Keb
7	Peserta Diklat Kelas D	1) Eka Tauria N. A.Md.Keb 2) Ridawati, A.Md.Keb
8	Peserta Diklat Kelas E	1) Okriyanto, S.P 2) Alis Suhardi, S.P

Sumber: olahan penelitian tahun 2018

¹² Lampiran Instruktur/Widyaiswara/Narasumber/Tenaga Pengajar Diklat Prajabatan CPNS dan Lampiran Peserta Diklat Prajabatan CPNS

Pelaksanaan Diklat

Pelaksanaan program diklat prajabatan oleh Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Provinsi Riau di Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2018 meliputi materi, kemampuan para peserta, dan efektivitas program pendidikan dan pelatihan (Diklat) prajabatan.

Tabel 2.6
Materi Diklat Prajabatan CPNS Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2018

No.	Materi	Jam Pelajaran (JP)
1	Wawasan kebangsaan	(6JP)
2	Memahami sikap untuk tidak korupsi	(12JP)
3	Memahami ketentuan kepegawaian: a) MTSL b) Kebijakan Umum Kepegawaian (peran, fungsi, kedudukan, kewajiban, dan hak) c) Kebijakan pengembangan sumber daya aparatur d) Manajemen ASN	(2JP) (3JP) (2JP) (2JP) (6 JP)
4	Pola Pikir ASN Sebagai Pelayanan Masyarakat	(24 JP)

Sumber: olahan penelitian tahun 2018

1. Kemampuan para Peserta Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan Kabupaten Kuantan Singing terkait Wawasan Kebangsaan, Peran dan Fungsi Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Kedudukan, Kewajiban dan Hak PNS, serta Pola Pikir ASN sebagai Pelayanan Masyarakat

a) Kemampuan Wawasan Kebangsaan

Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa perwakilan peserta diklat Prajabatan Kabupaten Kuantan Singing, diketahui bahwa kemampuan wawasan kebangsaan yang dimiliki atau dikuasai oleh masing-masing peserta adalah berbeda-beda. Berikut jawaban dari masing-masing peserta.

Wawasan kebangsaan tentang bangsa Indonesia dan pentingnya persatuan dan kesatuan.

(Hasil wawancara dengan peserta diklat kelas A yang bernama Teti Anatri Oriza pada Tanggal 26 April 2019)

Jawaban yang diberikan tersebut dapat dikatakan benar, walaupun tidak dijelaskan secara rinci atau lengkap mengenai wawasan kebangsaan. Dikatakan bahwa wawasan kebangsaan adalah materi terkait bangsa Indonesia, dan pentingnya persatuan dan kesatuan. Maksudnya, melalui wawasan kebangsaan, persatuan dan kesatuan bangsa dapat dipererat atau dapat menumbuhkan rasa cinta tanah air dan kebersamaan dalam satu bangsa yaitu bangsa Indonesia. Kemudian peserta peserta diklat kelas B mengatakan bahwa:

Wawasan kebangsaan itu adalah materi pengenalan tentang bangsa Indonesia agar cinta terhadap tanah air, dan pemahaman-pemahaman ideologi dan kehidupan berbangsa.

(Hasil wawancara dengan peserta diklat kelas B yang bernama Husni Thamrin pada Tanggal 27 April 2019)

Hal serupa juga dikatakan oleh peserta diklat kelas B, bahwa wawasan kebangsaan mengenai bangsa Indonesia agar menjadi cinta terhadap tanah air. Selain itu, melalui wawasan kebangsaan juga diberikan pemahaman tentang Pancasila, dan pemahaman tentang kehidupan berbangsa. Sementara itu, peserta diklat kelas C mengatakan bahwa:

Wawasan kebangsaan kemaren itu banyak yang dibahas, yang jelas itu intinya itu bagaimana cara hidup berbangsa dan bernegara.

(Hasil wawancara dengan peserta diklat kelas C yang bernama Wistri Putri Hasraya pada Tanggal 29 April 2019)

Dikatakan banyak hal yang dibahas dalam pemberian materi wawasan kebangsaan oleh BPSDM Provinsi Riau. Namun, inti dari pemberian materi wawasan kebangsaan adalah untuk mempelajari cara hidup berbangsa dan bernegara, yaitu bangsa dan negara Indonesia. Sedangkan pendapat lain dari peserta diklat kelas D adalah sebagai berikut:

Kalau wawasan kebangsaan itu konsep politik bangsa Indonesia untuk menciptakan bangsa yang satu atau terjaganya persatuan dan kesatuan.

(Hasil wawancara dengan peserta diklat kelas D yang bernama Eka Tauria pada Tanggal 29 April 2019)

Disebutkan bahwa wawasan kebangsaan adalah konsep politik bangsa Indonesia, dimana tujuannya untuk menyatukan konsep bernegara atau

menimbulkan atau menjaga rasa persatuan dan kesatuan tetap utuh di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Terakhir, peserta diklat kelas E mengatakan bahwa:

Setahu saya, wawasan kebangsaan kemaren tu meliputi banyak hal, bisa menjaga persatuan, bisa untuk meningkatkan rasa cinta pada tanah air, yang jelas materinya itu terkait kehidupan berbangsa.

(Hasil wawancara dengan peserta diklat kelas E yang bernama Okriyanto pada Tanggal 30 April 2019)

Efektivitas melaksanakan program pendidikan dan pelatihan (Diklat) prajabatan oleh BPSDM Provinsi Riau kepada para peserta diklat (CPNS) Kabupaten Kuantan Singingi pada Tahun 2018 menurut pendapat Kepala BPSDM Provinsi Riau adalah:

Kita tidak ada memberikan ukuran atau melakukan nilai ukur terkait sejauh mana efektivitas dari program diklat prajabatan. Diklat itu diadakan untuk pembekalan awal bagi CPNS yang akan diangkat menjadi PNS. Sama halnya seperti siswa baru, tentu ada orientasi kepada siswa baru tersebut. Demikian halnya kepada CPNS yang akan diangkat menjadi PNS. Sejauh ini diklat sudah diberikan efektif menyangkut masalah wawasan kebangsaan, tidak korupsi, tentang PNS itu sendiri, dan pola pikir ASN sebagai pelayan publik. Masalah-masalah itu tentunya masalah yang banyak didengar atau menjadi isu penting saat ini bagi PNS. Misalnya wawasan kebangsaan yang dianggap penting mengingat semakin banyaknya pertentangan-pertentangan yang menyebabkan kurangnya rasa persatuan dan kesatuan. Masalah korupsi karena banyaknya ASN yang korupsi. Pola pikir sebagai pelayan masyarakat,

karena banyaknya pengaduan kurangnya pelayanan yang diberikan oleh ASN, dan sebagainya.

(Hasil wawancara dengan Bapak H. Kasiaruddin, Tanggal 19 April 2019)

Disebutkan bahwa dilaksanakan program diklat prajabatan oleh BPSDM Provinsi Riau sebagai pembekalan awal bagi CPNS yang akan diangkat menjadi PNS. Efektivitas program diklat disesuaikan dengan permasalahan-permasalahan terkait PNS, yaitu masalah wawasan kebangsaan, pemahaman mengenai PNS, dan pola pikir PNS sebagai pelayan publik. Kemudian Kabid Pengembangan Kompetensi Manajerial BPSDM Provinsi Riau mengatakan bahwa:

Saya rasa efektif, karena kemampuan yang dikembangkan dalam diklat prajabatan adalah mencakup aspek-aspek yang sering bermasalah selama ini. Diharapkan dengan adanya diklat ini akan menciptakan PNS yang lebih baik lagi pada tiap tahunnya. Sehingga tercipta pemerintahan yang kuat, mandiri, bersih, memiliki kinerja baik, dan selalu memberikan pelayanan yang baik kepada publik.

(Hasil wawancara dengan Bapak Tengku Fazly Redwan, Tanggal 22 April 2019)

Dikatakan bahwa dilaksanakan program diklat prajabatan oleh BPSDM Provinsi Riau adalah efektif. Karena aspek-aspek yang diberikan untuk mengatasi permasalahan-permasalahan yang terjadi selama ini. Sehingga dinilai program diklat prajabatan ini dinilai efektif. Sedangkan menurut Widyaiswara BPSDM Provinsi Riau, bahwa:

Materi-materi yang diberikan pada diklat prajabatan menurut saya bekal yang efektif bagi PNS baru. Karena nantinya melalui diklat ini mereka sudah memiliki sikap

mental yang berwawasan kebangsaan yang benar, tertanam dalam dirinya untuk tidak KKN, mengerti dan memahami dirinya sebagai ASN dengan benar, dan memberikan pelayanan kepada publik dengan baik. Bukankah pokok-pokok itu yang harus dimiliki oleh ASN.

(Hasil wawancara dengan Ibu Hj. Yuniarti, Tanggal 25 April 2019)

Materi yang diberikan pada program diklat prajabatan dinilai efektif sebagai bekal PNS. Karena materi yang diberikan mencakup berbagai hal yang tepat guna bagi PNS. Sehingga PNS menjadi ASN memiliki wawasan kebangsaan yang benar, sehingga tidak melakukan KKN. Kemudian PNS mengerti dan memahami dirinya sebagai ASN dengan benar, dan selalu memberikan pelayanan kepada publik dengan baik.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa BPSDM Provinsi Riau telah menyelenggarakan program pendidikan dan pelatihan (diklat) prajabatan kepada CPNS Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2018. Adapun simpulan dari hasilnya adalah sebagai berikut:

1. Materi wawasan kebangsaan yang diberikan konsep politik bangsa Indonesia yang memandang Indonesia sebagai satu kesatuan wilayah (darat-laut-udara) yang tidak terpisahkan, yang mempersatukan bangsa dan negara secara menyeluruh pada semua bidang kehidupan meliputi: politik, ekonomi, sosial budaya, dan hankam. Kemudian peran dan fungsi Aparatur Sipil Negara (ASN) dan kedudukan, kewajiban dan hak PNS diberikan sesuai dengan Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. Sedangkan materi pola pikir ASN sebagai pelayanan

masyarakat yang diberikan oleh BPSDM Provinsi Riau adalah untuk mengembangkan konsep diri ASN atau PNS agar menjadi pelayan masyarakat yang baik.

2. Kemampuan para peserta pendidikan dan pelatihan (diklat) prajabatan Kabupaten Kuantan Singing terkait wawasan kebangsaan, peran dan fungsi Aparatur Sipil Negara (ASN) dan kedudukan, kewajiban dan hak PNS, serta pola pikir ASN sebagai pelayan masyarakat sudah sesuai dengan materi yang diberikan oleh BPSDM. Hanya saja tidak dapat dideskripsikan secara keseluruhan, hanya sebagian kecil materi saja.

3. Pelaksanaan program pendidikan dan pelatihan (diklat) prajabatan oleh BPSDM Provinsi Riau di Kabupaten Kuantan Singing dinilai sudah efektif. Karena aspek-aspek yang diberikan dinilai sesuai untuk kebutuhan PNS yang baru diangkat. Selain itu, aspek-aspek yang diberikan sesuai untuk mengatasi permasalahan yang sering terjadi pada PNS selama ini, baik itu masalah wawasan kebangsaan yang mulai kurang, belum dipahaminya hakikat PNS dengan baik, dan masih kurangnya pelayanan yang diberikan kepada masyarakat.

Saran

Berdasarkan kesimpulan penelitian, maka penulis ingin menyampaikan beberapa saran berikut:

1. Sebaiknya ada evaluasi oleh BPSDM Provinsi Riau terkait materi diklat prajabatan yang telah diberikan kepada CPNS Kabupaten Kuantan Singing, sehingga diketahui sejauh mana penguasaan peserta terhadap materi yang telah diberikan

2. Sebaiknya ada evaluasi secara berkala terkait wawasan kebangsaan, peran, fungsi, kedudukan, kewajiban dan hak PNS, serta pola pikir ASN sebagai pelayan

masyarakat. Sehingga diketahui sejauh mana PNS menerapkan pengetahuan yang diperolehnya melalui diklat prajabatan di saat ia bekerja sebagai PNS.

Daftar Pustaka

Buku:

Agus Dwiyanto, 2008, Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta.

Arikunto, S., 2002, Prosedur Suatu Penelitian: Pendekatan Praktek, Rineka Cipta, Jakarta.

Bappenas, 2008, Pengembangan Kebijakan Nasional dan Tata Pemerintahan, Tm Bappenas, tidak diterbitkan.

Daryanto, Bintoro, 2014, Manajemen Diklat, Gava Media, Yogyakarta.

Gulo W, 2005, Metodologi Penelitian, Gramedia, Jakarta.

Hardiyansyah, 2011, Kualitas Pelayanan Publik, Gava Media, Yogyakarta.

Hasibuan, Malayu. SP., 2009, Manajemen Sumber Daya Manusia, Bumi Aksara, Jakarta.

Mardiasmo, 2005, Manajemen Kinerja Sektor Publik, UPPAMP YKPN, Yogyakarta.

Moekijat, 2001, Evaluasi Pelatihan Dalam Rangka Peningkatan Produktivitas, Bandar Maju, Bandung.

Moleong, Lexy, 2016, Metodologi Penelitian Kualitatif, Rosdakarya, Bandung

Munaf, 2005, Hukum Administrasi Negera, Marpoyan Tujuh, Pekanbaru.

Notoatmodjo, S., 2009, Pengembangan Sumber Daya Manusia, Rineka Cipta, Jakarta.

Ratminto dan Winarsih, 2005, Manajemen Pelayanan, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.

Robert K. Yin, 2008, Studi Kasus : Desain dan Metode, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Sedarmayanti, 2009, Sumber Daya Manusia dan Produktivitas Kerja, Mandar Maju, Bandung.

Steers, Richard M., 2005, Efektivitas Organisasi, Erlangga, Jakarta.

Sugiyono, 2018, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D, Alfabeta, Bandung.

Sulistiyani, dkk., 2009 Manajemen Sumber Daya Manusia, Graha Ilmu, Yogyakarta.

Sutrisno, Edy, 2011, Manajemen Sumber Daya Manusia, Kencana, Jakarta

Peraturan Perundang-Undangan:

Keputusan Presiden Republik Indonesia No.159 Tahun 2000 Tentang Pedoman Badan Kepegawaian.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil.

Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.

Dokumen

Detakriau.com, 2018, Bupati Kuansing Harapkan Birokrasi dan Pelayanan Publik Meningkat, Diakses Tanggal 23 September 2018.

BKP2D Kabupaten Kuantan Singingi, Surat Pemanggilan Peserta Diklat No 893.3/BKPP-03/433

Keputusan Kepala Badan BPSDM Provinsi Riau Nomor 39 Tahun 2018 Tentang Panduan Penyelenggaraan Prajab K2 Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2018.

Laporan Hasil Diklat. 2018. Kuansing: Badan Kepegawaian dan Diklat Daerah Kabupaten .

Pedoman Diklat Prajab - dan III tahun 2018. Kuansing : Badan Kepegawaian, dan Diklat Daerah Kabupaten Kuansing.

Panduan Penyelenggaraan Prajab K2 Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2018

Ranahriau.com, 2018, Pelayanan Publik Mengalami Berbagai Masalah di Kuansing, Diakses Tanggal 22 September 2018.

Skripsi/Jurnal

Dewiana, 2015, Pelaksanaan Pendidikan dan Latihan (Diklat) dalam Upaya Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan Oleh Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan (BKPP) Kabupaten Kampar.

Haris Nur Luckman, 2016, Pelaksanaan Program Pendidikan dan Latihan (Diklat): Kajian Proses Diklat dalam Jabatan pada Badan

Kepegawaian Daerah (BKD) Kota
Surakarta.

Harnold, 2017, Pendidikan dan Pelatihan
dalam Meningkatkan Kualitas
Pegawai dalam Pelayanan Publik di
Badan Kepegawaian Daerah
Kabupaten Malinau.

Luthfi, Ahmad, 2015, Pelaksanaan Diklat
Prajabatan Pada Badan
Kepegawaian dan Diklat Daerah
(BKDD) Kabupaten Bulukumba.

Ramadhani, Triyana, 2017, Fungsi Badan
Kepegawaian Daerah (BKD) dalam
Pengembangan Pegawai di Provinsi
Riau Tahun 2016.

Sepwiraka Adhi Ganda, 2018, Pelaksanaan
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai
Aparatur Sipil Negera di
Lingkungan Sekretariat Daerah
Kota Pekanbaru Tahun 2016.
Jurnal JOM FISIP Vol. 5 No. 1